



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 784 /SEK/OT.01.1/04/2023 17 April 2023  
Hal : Permohonan ABT Melalui Aplikasi e-IPLANS

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
2. Para Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;  
3. Para Sekretaris Badan Peradilan Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;  
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama;  
di  
tempat

Dalam rangka pengembangan aplikasi e-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*) dan banyaknya usulan tambahan anggaran pada TA 2023 dari satuan kerja, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menu Usulan ABT pada aplikasi e-IPLANS diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional dan belanja modal yang sifatnya mendesak pada tahun anggaran berjalan;
  - a. Satuan kerja melakukan penginputan usulan tambahan anggaran tahun berjalan dengan melampirkan surat usulan, TOR dan RAB serta data dukung lain;
  - b. Pengadilan Tingkat Banding melakukan verifikasi kelengkapan data atas usulan yang diajukan satker;
  - c. Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi melakukan analisis atas usulan satker yang telah divalidasi oleh Tingkat Banding. Usulan belanja pegawai dan belanja barang operasional akan diteruskan ke Biro Keuangan untuk mendapat proses lebih lanjut sesuai dengan ketersediaan anggaran, sedangkan usulan belanja modal akan dilakukan analisa dengan memperhatikan Usulan Baseline yang telah diajukan untuk Tahun Anggaran berikutnya;
2. Usulan tambahan anggaran yang tidak dapat dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran, maka satuan kerja dapat mengusulkan kembali pada Usulan Baseline Tahun Anggaran berikutnya;
3. Dalam rangka mendukung transformasi digital, Biro Perencanaan dan Organisasi mewajibkan setiap usulan anggaran diajukan melalui aplikasi e-IPLANS;

Adapun petunjuk penggunaan aplikasi dapat dilihat pada pada menu Tutorial aplikasi e-IPLANS.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi;
10. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;
11. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi.